

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP KUALITAS ATAS INFORMASI KAS PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) TOMOHON

Tesalonika Maryanti Rintjap¹, Treesje A. C Langi², Lusye Corvany Kumaat³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email: Tesalonikarintjap03@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of Good Corporate Governance (GCG) implementation on the quality of cash information at PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomohon. GCG is a corporate governance principle that emphasizes transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness especially crucial for state-owned enterprises. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with finance and accounting staff, observations, and documentation of internal financial reports. The findings indicate that the application of GCG principles particularly transparency and accountability positively influences the quality of cash information. The cash information is presented in a more structured, relevant manner and complies with applicable financial reporting standards. This improves clarity and enhances stakeholders' trust in the company's financial reports. The study concludes that the better the implementation of GCG, the higher the quality of the resulting cash information. Therefore, it is recommended that PT PLN ULP Tomohon continue strengthening GCG practices through internal training, human resource competency development, and the optimization of integrated financial reporting systems. Consistent GCG implementation supports the establishment of sustainable and professional corporate governance.

Keywords: GCG, Notes To The Financial Statements, Financial Statement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kualitas informasi kas pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomohon. GCG merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, yang sangat penting diterapkan pada perusahaan milik negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai bagian keuangan dan akuntansi, observasi, serta dokumentasi laporan keuangan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG, khususnya transparansi dan akuntabilitas, berkontribusi positif terhadap kualitas informasi kas. Informasi kas disajikan secara lebih terstruktur, relevan, dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Hal ini mempermudah pemahaman dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Disimpulkan bahwa semakin baik penerapan GCG, semakin tinggi pula kualitas informasi kas yang dihasilkan. Oleh karena itu, PT PLN ULP Tomohon disarankan untuk terus memperkuat implementasi GCG melalui pelatihan internal, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan sistem pelaporan keuangan terintegrasi.

Penerapan GCG yang konsisten akan mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan profesional.

Kata-kata Kunci: GCG, CALK, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomohon sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadapi tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, khususnya terkait informasi kas. Kas merupakan aset paling likuid yang mempengaruhi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Kualitas informasi kas sangat penting karena menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan dan bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Permasalahan yang muncul adalah potensi keterlambatan, ketidaktepatan, serta rendahnya keandalan informasi kas akibat belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan GCG terhadap kualitas informasi kas di PT PLN ULP Tomohon. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokusnya pada implementasi lima prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) serta empat indikator kualitas informasi kas (relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dan keterpahaman).

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas pelaporan, terutama yang berkaitan dengan informasi kas. Tantangan ini mencerminkan perlunya penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. GCG merupakan sistem tata kelola yang bertumpu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian yang efektif dan partisipasi seluruh stakeholder internal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG secara konsisten berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dengan memperkuat transparansi dan pengawasan, perusahaan dapat mencegah praktik moral hazard dan meningkatkan kepercayaan publik. Khususnya dalam konteks BUMN, GCG menjadi alat penting untuk menjamin integritas pengelolaan dana publik.

Mengingat pentingnya informasi kas dalam laporan keuangan dan peran GCG dalam memperbaiki kualitas pelaporan, maka perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana penerapan prinsip GCG berdampak terhadap kualitas informasi kas di lingkungan PT PLN (Persero) ULP Tomohon. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola perusahaan dan peningkatan akurasi pelaporan kas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik dan pemangku kepentingan lainnya.

LANDASAN TEORI

Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Effendi (2016), *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian dalam perusahaan yang dirancang untuk mengelola risiko signifikan dan mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. GCG berfungsi sebagai alat manajemen strategis dalam menjamin bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*fairness*). Dengan penerapan GCG, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mencegah penyimpangan, serta memperkuat kepercayaan publik.

Wardoyo et al. (2021) menekankan bahwa GCG dapat dipahami dalam konteks teori keagenan (agency theory), yang melihat hubungan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Dalam teori ini, konflik kepentingan sering terjadi ketika agen bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. GCG hadir sebagai solusi untuk mengurangi konflik ini melalui mekanisme pengawasan dan kontrol, seperti transparansi laporan keuangan, independensi dewan komisaris, dan sistem audit internal yang kuat.

Indikator keberhasilan penerapan GCG dapat dilihat dari beberapa aspek utama:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi penting yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (Lewis).
2. Akuntabilitas, yang berarti setiap kebijakan dan kegiatan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis kepada otoritas internal maupun eksternal (Roberts).
3. Responsibilitas, yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat dan negara.
4. Independensi, yaitu kebebasan manajemen dan dewan pengawas dari pengaruh pihak tertentu demi menjamin objektivitas pengambilan keputusan.
5. Kewajaran/Fairness, yang menekankan perlakuan adil terhadap semua pihak, termasuk investor, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis.

Dengan menerapkan indikator-indikator tersebut, perusahaan dapat menciptakan iklim kerja yang etis dan terstruktur secara sistematis.

Konsep Informasi Kas

Informasi kas merupakan bagian penting dari laporan keuangan karena menyangkut semua aktivitas keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Kas adalah aset yang sangat likuid dan digunakan dalam berbagai aktivitas perusahaan, mulai dari pembayaran operasional hingga pelunasan kewajiban jangka pendek.

Informasi kas yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik utama, yaitu:

1. Relevansi – informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Keandalan – informasi harus akurat, bebas dari kesalahan material, dan dapat dipercaya.
3. Ketepatan waktu – informasi tersedia pada saat dibutuhkan.
4. Keterpahaman – informasi disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Informasi kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut akan mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh. Dalam konteks BUMN seperti PT PLN (Persero), kualitas informasi kas juga mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip GCG dan pengelolaan dana publik yang bertanggung jawab. Informasi yang tidak akurat atau disajikan secara tertutup dapat mengganggu kepercayaan publik dan menimbulkan risiko hukum serta reputasi bagi perusahaan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan GCG dengan kualitas pelaporan keuangan. Purba (2017) menemukan bahwa prinsip-prinsip GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Hayati et al. (2023) dalam studinya pada PT PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, menyimpulkan bahwa implementasi GCG berdampak langsung pada meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan.

Hapsari (2023) melalui pendekatan kualitatif pada perusahaan sector keberlanjutan, mengungkapkan bahwa transparansi dan keterlibatan stakeholder menjadi faktor dominan

dalam mendorong peningkatan pengungkapan informasi. Penelitian oleh M. Iqbal juga menunjukkan bahwa penerapan GCG secara menyeluruh dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan PLN di wilayah Sumatera Utara.

Meski terdapat perbedaan konteks dan metode penelitian, mayoritas studi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas informasi dan tata kelola perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kualitas informasi kas di PT PLN (Persero) ULP Tomohon. Metode ini menekankan pada pengumpulan data secara alamiah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Objek penelitian adalah penerapan GCG dalam penyusunan dan pelaporan informasi kas. Penelitian dilakukan di PT PLN (Persero) ULP Tomohon, Sulawesi Utara, dari Februari hingga Mei 2025.

Sumber Data

1. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan karyawan divisi administrasi dan keuangan, observasi langsung proses pelaporan, serta dokumen internal seperti laporan keuangan, hasil audit, dan laporan komite GCG.
2. Data Sekunder berasal dari literatur terkait, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi perusahaan.

Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara tidak terstruktur, untuk menggali pengalaman dan pemahaman staf terkait GCG dan informasi kas.
2. Observasi langsung, untuk memahami penerapan prinsip GCG dalam proses akuntansi.
3. Dokumentasi, untuk memperoleh bukti tertulis dari perusahaan.

Teknik dan Tahapan Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi data: menyaring informasi yang relevan.
2. Penyajian data: dalam bentuk narasi atau table untuk menunjukkan hubungan antara GCG dan kualitas informasi kas.
3. Penarikan kesimpulan: untuk menjelaskan sejauh mana GCG memengaruhi kualitas informasi kas, serta memberikan rekomendasi strategis kedepan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomohon dengan tujuan untuk menganalisis dampak penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kualitas informasi kas. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai bagian keuangan dan teknis, observasi langsung di lapangan, serta dokumen-dokumen keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN ULP Tomohon telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, keterlibatan stakeholder, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas informasi kas, terutama pada aspek relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dan keterpahaman informasi.

Berikut disajikan ringkasan temuan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Ringkasan Penerapan GCG dan Dampaknya terhadap Informasi Kas

No	Bentuk Transparansi	Pelaku	Dampak Terhadap Informasi Kas
1.	Keterlibatan karyawan unit teknis dan keuangan dalam penyusunan data kas	Karyawan bagian teknis, tim keuangan, pimpinan ULP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi kas lebih faktual dan akurat - Meningkatkan rasa tanggung jawab bersama - Proses lebih kolaboratif
2.	Penyajian data anggaran yang berdampak sosial (pemeliharaan, subsidi, CSR) dalam informasi kas	Tim keuangan, pimpinan ULP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi kas mencerminkan nilai sosial perusahaan - Meningkatkan kepercayaan publik - Transparansi pada alokasi anggaran
3.	Integrasi data dari vendor/kontraktor ke dalam laporan kas	Mitra kerja (vendor, kontraktor), tim keuangan, pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi kas menjadi lebih lengkap dan akurat - Mengurangi risiko kekeliruan data utang/piutang - Mempercepat penyusunan laporan
4.	Verifikasi ketat oleh pimpinan, kejelasan struktur informasi, akses terbatas namun prosedural	Pimpinan ULP, tim verifikasi, auditor internal	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi kas mencerminkan kondisi nyata - Meningkatkan akuntabilitas publik - Menjaga kredibilitas laporan keuangan
5.	Pengawasan langsung pimpinan, objektivitas dalam penyusunan laporan, penerapan etika keuangan	Pimpinan ULP	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan integritas laporan kas - Mencegah manipulasi data - Mendukung pengambilan keputusan yang adil dan tepat

Sumber: Data diolah (2025)

Pelibatan Stakeholder Internal dalam Penyusunan Informasi Kas

PT PLN (Persero) ULP Tomohon melibatkan stakeholder internal, terutama bagian keuangan dan unit teknis, dalam proses penyusunan informasi kas. Meskipun tidak menyeluruh, pelibatan ini mencerminkan penerapan prinsip partisipasi dan akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Karyawan teknis memberikan data operasional yang kemudian diverifikasi dan diolah oleh tim keuangan. Pelibatan ini membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap transparansi keuangan dan mendukung budaya organisasi yang kolaboratif.

Pelaporan Informasi Kas sebagai Komitmen Pelayanan Publik

Sebagai BUMN, PLN ULP Tomohon menjadikan pelaporan informasi kas tidak hanya sebagai kewajiban internal, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik. Informasi terkait anggaran pemeliharaan jaringan, subsidi, dan program sosial dicantumkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan dana publik.

Meskipun tidak langsung diakses oleh pelanggan, laporan ini mendukung transparansi dan menunjukkan kepedulian terhadap dampak social dari keputusan keuangan.

Peran Mitra Kerja dalam Kelengkapan Informasi Kas

Mitra kerja seperti vendor dan kontraktor berkontribusi penting terhadap kelengkapan informasi kas, terutama terkait kewajiban pembayaran dan pengadaan barang/jasa. Koordinasi yang baik dengan mitra memungkinkan data keuangan disusun secara akurat dan tepat waktu. Validasi dokumen eksternal oleh pimpinan ULP menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian serta sinergi eksternal dalam mendukung transparansi laporan keuangan.

Transparansi Akses dan Kejujuran Informasi sebagai Wujud Akuntabilitas

PLN ULP Tomohon menjaga keterbukaan dan kejujuran dalam penyusunan informasi kas sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Akses terhadap laporan dibuka terbatas bagi pihak yang berwenang, namun isi laporan disusun secara faktual dan terverifikasi. Ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan publik melalui informasi keuangan yang jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Profesionalisme Pimpinan dalam Pengawasan dan Pengambilan Keputusan

Pimpinan ULP Tomohon memainkan peran sentral dalam pengawasan dan pengambilan keputusan keuangan. Pengawasan dilakukan secara langsung pada setiap tahap penyusunan laporan untuk menjamin akurasi data. Keputusan finansial diambil berdasarkan prinsip etika, keadilan, dan regulasi yang berlaku, mencerminkan integritas serta penerapan GCG yang kuat dalam praktik kepemimpinan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh secara positif terhadap kualitas informasi kas pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tomohon. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap regulasi terbukti meningkatkan kualitas informasi kas, terutama dalam aspek relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dan keterpahaman.

Transparansi dalam penyajian data keuangan memungkinkan akses informasi yang terbuka bagi seluruh unit terkait, sementara akuntabilitas menciptakan sistem pertanggungjawaban yang jelas dalam pencatatan dan pelaporan kas. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pelaporan, termasuk divisi keuangan, teknis, dan mitra kerja, berkontribusi terhadap validitas dan objektivitas data. Selain itu, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan prosedur internal memastikan bahwa laporan kas disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan GCG di PT PLN ULP Tomohon tidak hanya menjadi instrumen tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga berperan strategis dalam menjamin bahwa informasi kas yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2017). *Teori Akuntansi* (Edisi 7). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayati, N., Syafril, S., & Darmawan, D. (2023). Implementasi Good Corporate Governance terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 112–123.
- Hapsari, R. D. (2023). Transparansi dalam Pengungkapan Informasi Keuangan Perusahaan Berbasis Sustainability: Studi Kualitatif. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(2), 87–98.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2: Laporan Arus Kas*. Jakarta: IAI.
- Iqbal, M. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada PT PLN Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 10(6), 1–15.
- Nurkholis. (2018). *Akuntabilitas dan Good Governance dalam Sektor Publik*. Jakarta: Kencana.
- Purba, J. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 59–70.
- Wardoyo, C., Aditya, R., & Kurniawan, H. (2021). Good Corporate Governance: Perspektif Teori Agensi dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 44–55.